

Berjuang untuk Demokrasi:

Kiprah Subchan ZE Menjelang dan Awal Orde Baru

Oleh Arief Mudatsir Mandan

Tulisan ini, secara selintas mencoba melihat posisi Subchan ZE dalam proses perubahan sosial politik di saat dan sesudah tumbang PKI tahun 1965, yang melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai Orde Baru dan perjalanan awal orde tersebut. Periode ini penting dikaji karena merupakan tahun-tahun yang penuh gejolak dan menandai masa transisi dari tumbangnya G30S PKI, menuju berakhirnya kekuasaan Soekarno, bermuara pada dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI kedua serta proses konsolidasi yang dilakukannya.

Dalam hal ini yang hendak dijelaskan adalah: Pertama, peranan Subchan ZE dalam menumbangkan G30S, melalui perannya sebagai Ketua KAP Gestapu/Front Pancasila; Kedua, menelusuri obsesi Subchan ZE mengenai tatanan sosial politik yang dicita-citakan baik dalam skala negara maupun dalam NU serta manuver politik melalui perannya sebagai wakil Ketua MPRS maupun sebagai tokoh NU.



Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana UI. Pernah terlibat dalam pendirian Lakpesdam-NU dan menjadi salah satu aktivisnya.

Subchan ZE sebagai tokoh nasional

Memahami peran Subchan ZE¹, dalam sejarah kelahiran Orde Baru bukan merupakan hal yang sulit. Tapi untuk mengetahui siapa dia sebenarnya, masih menjadi pertanyaan. Dia hanya meninggalkan "nama": Subchan ZE. Tak banyak karya tulis yang ditinggalkannya, jika tidak boleh dikatakan tidak ada. Padahal menurut kesaksian dari banyak teman dekatnya, dia amat cerdas pada zamannya. Yang memudahkan untuk melacak siapa Subchan adalah karena sifatnya yang pendobrak dan kepribadiannya yang terbuka, juga gagasannya yang sering melampaui batas. Sifatnya yang seperti itu menyebabkan dia dikenal banyak orang.²

Menurut Harry Tjan, tampilnya Subchan memimpin KAP Gestapu, misalnya saja, karena dia adalah tokoh partai NU yang disegani dan populer di kalangan kaum muda. "Subchan disegani di kalangan pemuda, karena itu mereka memintanya mengorganisir pemuda untuk melawan PKI. Pada



Subchan ZE (berdasi) saat mendampingi AH Nasution selaku Wakil Ketua MPRS di tahun 1960-an.

saat itu Subchan dinilai sebagai tokoh senior yang penuh dedikasi dan bisa diterima oleh semua pihak,” kata Tjan.³

Sepanjang karir politiknya, Subchan banyak menarik perhatian orang, baik kawan maupun lawan. Namun di saat namanya melambung, tetapi belum mencapai puncak karir, dia keburu dipanggil Tuhan. Subchan meninggal di Arab Saudi dalam kecelakaan mobil, sekitar 70-100 kilometer di luar kota Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji, dalam usia yang relatif muda, 43 tahun. Sebab kematiannya masih merupakan misteri sampai sekarang.⁴

Subchan ZE dan KAP Gestapu Front Pancasila

Subchan ZE, seperti juga tokoh-tokoh kenamaan lainnya adalah merupakan hasil dari produk sejarah yang mereka buat sendiri. Ia dilahirkan dan kemudian berhubungan erat dengan lingkungan sejarah dan watak kejadian pada saat tertentu, yaitu peristiwa G30S/PKI. Tetapi peran yang dimainkan Subchan dalam memimpin penumpasan PKI dari kalangan sipil, bukan merupakan barang kebetulan belaka, melainkan berkat kepekaan intelektual serta naluri politiknya. Subchan melihat setiap kali perubahan

terjadi, dan menghubungkannya dengan suhu politik yang kian meningkat akibat agitasi komunis yang bermuara pada peristiwa G30S, dini hari tanggal 1 Oktober 1965 itu.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Subchan memprakarsai pertemuan dengan tokoh-tokoh partai dan pemuda. Mereka kemudian menghubungi pihak militer, di antaranya Jenderal Umar Wirahadikusuma dan Jenderal Su-

ciptu dari KOTI⁵. Keesokan harinya Jenderal Su-ciptu mengadakan pertemuan dengan parpol yang kemudian melahirkan pernyataan bersama yang ditandatangani pada 4 Oktober 1965 yang isinya mengutuk perbuatan kontra revolusi G30S.⁶ Salah satu yang menandatangani pernyataan tersebut adalah Subchan ZE.⁷

Sejak saat itu rumah Subchan di Jalan Banyumas Menteng dijadikan markas anak-anak muda yang mengkoordinasikan gerakan anti Gestapu. Kesatuan Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi G30S, atau disingkat KAP Gestapu, dengan Subchan sebagai ketuanya, resmi berdiri pada 4 Oktober 1965.⁸ Dua puluh hari kemudian, 25 Oktober 1965 KAMI (Kesatuan aksi Masiswa Indonesia), sebagai kekuatan inti KAP Gestapu, resmi berdiri. Sehari setelah pembentukan KAMI, massa mahasiswa dan masyarakat yang berkekuatan 100 ribu mengadakan demonstrasi.⁹

Para pemimpin KAP mengorganisasikan massa dalam rapat-rapat akbar, mengendalikan demonstrasi (sejak saat itu dikenal istilah “Parlemen Jalanan”), memonitor perkembangan situasi, merumuskan pernyataan sikap dan menentukan aksi massa yang pelaksanaannya didukung oleh organisasi anggota KAP.

Sumber: Buku Memenuhi Panggilan Tugas

Agitasi komunis menjelang peristiwa G30S.

Pada saat menjelang G30S, Ketua CC PKI Aidit¹⁰ mengomandokan kepada seluruh unsur partai untuk meningkatkan ofensive revolusioner sampai ke puncaknya. Komando itu meliputi segala bidang kehidupan seperti sosial dan politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga menciptakan situasi yang mereka inginkan. Tanggal 23 Mei 1965, PKI menyelenggarakan pesta ulang tahun ke 45 yang dirayakan secara besar-besaran di stadion utama Senayan. Perayaan yang dihadiri oleh lebih dari 150 ribu pendukungnya itu berisikan pidato-pidato agitasi untuk membakar dan memanaskan suasana. Massa dijejali dengan ajaran komunisme dan tuntutan PKI yang di antaranya: Ganyang 7 setan desa; Ganyang 3 setan kota; Ganyang Kabir (Kapitalis birokrat); Bentuk Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom; Bentuk Angkatan ke V; Adakan pemilu ke II; Laksanakan Manifesto Politik (Manipol); dan Deklarasikan Ekonomi (Dekom) secara konsekuen; Intensifkan konfrontasi dengan Malaysia; Bentuk Vietnam Utara; dan Ganyang kebudayaan Barat (musik ngak-ngik-ngok).¹¹

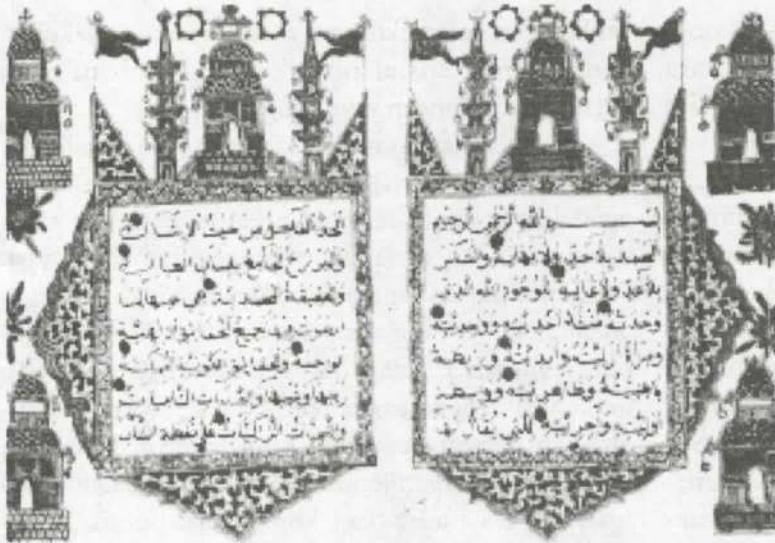
Usaha PKI untuk mengacaukan situasi ini sesungguhnya sudah dimulai sejak Soekarno mempermak-lumkan Dekrit Presiden Juli 1959 maupun Penpres No. 7 tahun 1959, yang mengatur dapat tidaknya parpol diakui eksistensinya dalam negara RI dengan ketentuan-ketentuan khusus.¹² Pada umumnya partai politik dan organisasi massa mendukung Dekrit ini. Namun PKI mendukung dengan disertai perhitungan bahwa dengan dukungan itu, PKI akan dapat merealisasikan ide Nasakom. Melalui penggarapan yang sistematis, maka diciptakanlah suasana untuk meyakinkan Soekarno, bahwa tanpa PKI Soekarno akan menjadi lemah atas serangan dari luar, termasuk se-rangan TNI.

Dunia pemuda dan kemahasiswaan saat itu dikuasai oleh golongan kiri yang pro Nasakom. Awal tahun 60-an PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) sudah didominir oleh organisasi mahasiswa CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa

Indonesia). Seiring dengan garis keras PKI, CGMI melakukan aksi-aksi serupa di dunia kemahasiswaan. Sasaran utamanya adalah organisasi yang dianggap kontra revolusioner dan kaum reaksioner. Dalam hal ini terutama ditujukan kepada HMI (Himpunan Masiswa Islam). Golongan ini mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan HMI, seperti halnya Soekarno membubarkan Masyumi.¹³

Situasi politik makin memanas pada bulan Juli dan Agustus 1965. Aksi yang dilancarkan PKI, CGMI dan Pemuda Rakyat makin brutal. Mereka melakukan latihan-latihan rahasia di Lubang Buaya. Untuk apa latihan kemiliteran itu dilakukan, belum diketahui pasti. Melihat gelagat tersebut, Subchan dan kawan-kawannya, diantaranya Harry Tjan Silalahi (di kemudian hari Tjan menjadi pasangan duet Subchan dalam KAP¹⁴) sepakat mengambil langkah siaga. Subchan bersama Front Islam, yang terdiri dari kalangan HMI, PMII, Ansor, Muhammadiyah dll. Sementara di front Katolik, Harry Tjan bersiap-siap menjaga setiap kemungkinan. Yang pertama bergabung pada saat itu, di antaranya, dari pihak Subchan: Mar'ie Muhammad, Zamroni, Firdaus Wadjdi, Lukman Harun, Murtadlo, dll. Sedang dipihak Harry, seperti Cosmas Batubara, Yusuf Wanandi, Savarinus, dkk.

Bulan September, situasi di Jakarta makin memanas, tegang, tak menentu, dan membingungkan. Ofensif PKI di segala bidang makin meningkat dan terang-terangan. PKI dengan mudah menuduh dan menuding pihak manapun sebagai agen Nekolim dan kontra revolusioner yang harus disingkirkan. Ini semua, misalnya, dilontarkan dalam rapat-rapat raksasa pada hari-hari terakhir bulan September 1965. Sampai saat itu PKI merasa berhasil menjinakkan atau menyingkirkan lawan-lawan politiknya, baik dalam partai maupun ormas. Tinggal satu "tembok besar" yang belum dapat disingkirkan dalam programnya, yaitu ABRI, terutama Angkatan Darat. Untuk itu PKI dengan pelbagai cara mulai melancarkan fitnah yang ditujukan kepada Angkatan Darat dengan isu adanya "Dewan Jenderal" yang bermaksud hendak melakukan kudeta.



Dini hari menjelang subuh G30S meletus

Sesungguhnya kalangan ABRI sudah mencium gelagat, bahwa akan terjadi sesuatu dengan PKI. Nasution sendiri berpendirian, Angkatan Darat tetap anti komunis, dan jika terjadi sesuatu atas pemerintah, AD sudah siap. Pada bulan September itu juga, Subchan dan Harry Tjan bersepakat mengadakan latihan bersama dengan melibatkan AD.¹⁵ Ketika satu kali latihan lagi dimulai ketika Jum'at dini hari tanggal 1 Oktober 1965, G30S PKI meletus.¹⁶

Gerakan dipimpin oleh Lettu Dul Arief, di bawah komando "Dewan Revolusi", bermarkas di Lubang Buaya. Pada jam 06.30 pagi harinya, pasukan Bimasakti berhasil menguasai RRI. Dalam warta berita jam 07.00 disebutkan Letnan Kolonel Untung telah menyelamatkan Presiden dari Kudeta Dewan Jendral, berita itu diulang kembali sejam kemudian. Di Cawang Bimasaktipun berjaga-jaga untuk menyelamatkan Presiden sekiranya ada bahaya mendadak. Pada jam 13.30 dekrit pembentukan Dewan Jendral diumumkan lengkap dengan susunan personalianya. Pengumuman itu disertai penurunan dan kenaikan pangkat menurut selera yang membuat keputusan. Keputusan itu ditandatangani Letnan Kolonel Untung sebagai Ketua Dewan Revolusi.¹⁷

Sementara itu pada jam 15.00, Subchan dan kawan-kawan mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi peristiwa yang sedang terjadi. Mereka segera memastikan bahwa penculikan dan pembunuhan dila-kukan oleh PKI. Menghadapi situasi se-perti itu, mereka akhirnya sepakat membentuk komando aksi melawan Pemuda Rakyat di sekitar Lubang Buaya, jika me-reka masuk ke kota. Harry Tjan mem-bawahi 40 orang pemuda Katolik dan PMKRI, sementara itu Subchan mempunyai lebih banyak lagi pasukan dari pemu-da Ansor, HMI, PMII, Pemuda Muha-madiyah, dll.

Konsolidasi Politik Orde Baru pada Sidang-sidang Umum MPRS

Sidang Umum MPRS IV bulan Juni-Juli 1966, akhirnya terselenggarakan atas tuntutan rakyat melalui demonstrasi-demonstrasi kesatuan aksi di berbagai kota besar di Indonesia. Untuk memenuhi tuntutan rakyat tersebut, langkah pertama yang diambil sidang adalah mengundang TAP MPRS No. IX tahun 1966 yang pada intinya mengukuhkan eksistensi Supersemar, kemudian TAP No. I/MPRS/1966 yang berisi peneguhan fungsi MPRS sebagai badan tertinggi dalam Negara RI dan merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat Indonesia serta wajib menghentikan pelanggaran terhadap UUD 45 sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

Tanggal 21 Juni 1966, Nasution terpilih menjadi Ketua MPRS yang baru. Sedangkan pada saat yang sama, Subchan menempati posisi wakil ketua. Nasution diusulkan oleh Golongan Karya, lalu disepakati oleh golongan lainnya. Sementara itu tiap-tiap golongan mengajukan calonnya masing-masing. Golongan Islam mengusulkan Subchan, Nasionalis mengusulkan Osa Maliki, Golongan Kristen/Katolik mengusulkan M. Siregar, dan Golongan Daerah mengusulkan Jenderal Mashudi. Seluruh calon-calon ini akhirnya disepakati sebagai wakil ketua mendampingi Nasution.

Masa persidangan MPRS IV 1966 ini sesungguhnya merupakan awal perjalanan politik Orde Baru dalam rangka melakukan konsolidasi politik. Ini terlihat secara jelas dari TAP-TAP yang dihasilkan MPRS, yaitu suatu upaya mengeliminasi kekuasaan Soekarno dan menyingkirkannya dari pentas politik secara konstitusional. Dari seluruh hasil ketetapan MPRS, maka TAP No. XIII yang menyangkut siapa yang akan menyusun kabinet merupakan ketetapan yang amat sensitif dan memerlukan perdebatan panjang. Di situ dipersoalkan siapa yang akan menyusun kabinet: Presiden Soekarno atau Pemegang Supersemar Jendral Soeharto? Ketetapan No. XIII meminta Soekarno menugaskan Jendral Soeharto menyusun kabinet. Tapi Soekarno segera menyanggah: jika Soeharto yang menyusun kabinet berarti menyimpang dari UUD 45 yang menyebutkan bahwa Presidenlah yang membentuk kabinet. Dalam perkara pelik ini, Subchan pernah ditugasi menghadap Soekarno untuk melakukan kompromi, tapi tugas ini gagal.

Melalui musyawarah antar fraksi yang melahkannya akhirnya MPRS menyepakati jiwa TAP XIII tersebut yaitu pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bersama dengan pemegang Supersemar. Dan tanggal 25 Juli 1966 Kabinet Ampera terbentuk, dengan pengaruh Jendral Soeharto yang sangat kuat. Kabinet tersebut terdiri dari 5 Menteri Utama ditambah dengan 24 Menteri dengan Soeharto sebagai Ketua Presidium yang kemudian diambil sumpahnya di Istana Negara oleh Soekarno.¹⁸

Demikianlah setelah kabinet dilantik, Soeharto segera melakukan konsolidasi politik besar-besaran untuk mencapai sasaran strategis lebih lanjut. Dalam rangka konsolidasi itu pimpinan AD membentuk apa yang disebut tim Supersemar, di samping membentuk tim-tim sosial politik lainnya.¹⁹ Di samping mempersiapkan konsep pembangunan ekonomi dan sosial politik, dalam tubuh ABRI juga dilakukan mutasi besar-besaran atas para panglima dan pergantian posisi-posisi strategis. Ini semua dilakukan untuk merumuskan konsep pembangunan serta sistem pengamanan pelaksanaannya yang diharapkan bisa mem-

cahkan persoalan ekonomi saat itu, serta melakukan pembenahan sosial politik agar kondusif bagi pelaksanaan konsep pembangunan.

Pada tingkat kesatuan aksi juga kurang lebih dilakukan hal yang sama, yaitu konsolidasi. Mereka mengadakan seminar-seminar mencari konsepsi pembangunan, dan melakukan penyegaran organisasi. Partai politikpun segera mempersiapkan diri dengan melakukan hal yang sama dan untuk tujuan yang kurang lebih sama. Tetapi dari segi ini, ABRI yang telah berkoalisi dengan kaum teknokrat lebih siap dibandingkan dengan kekuatan sipil lainnya. Kekuatan Orde Baru, dengan Jendral Soeharto sebagai *central figure*, segera melakukan konsolidasi politik besar-besaran dengan ABRI dan kaum teknokrat sebagai pilar utamanya. Mengenai hal ini, penting untuk ditelusuri lebih jauh apa yang ditulis Dr. AH. Nasution dalam bukunya, *Memenuhi Panggilan Tugas*, jilid 7: "Inilah ambang pintu konstelasi politik ke dasawarsa-dasawarsa berikutnya, yakni pembangunan oleh teknokrat dengan stabilitas politik serta keamanan oleh ABRI. Aliansi ABRI-Technokrat telah menggantikan aliansi ABRI-Kesatuan Aksi."

Dalam konteks perjalanan awal Orde Baru ini, peranan kelompok di luar ABRI-teknokrat termasuk Kesatuan Aksi, mulai nampak tidak menduduki posisi yang utama, melainkan lebih berfungsi sebagai "supporting mass" untuk keperluan legitimasi politik. Sementara Subchan ZE, sebagai simbol Kesatuan Aksi, dalam pergolakan sejarah ini hanya dilihat sebagai profesional di bidang penggalangan massa. Peranan Subchan mula-mula sangat menonjol, terutama pada saat menggalang kekuatan organisasi sosial politik menjadi KAP Gestapu yang berdiri di depan menumbangkan PKI. Tetapi ketika kekuatan Orde Baru melakukan konsolidasi politik, melalui "meja perundingan", peranan utama Subchan di arena MPRS sebagai Wakil Ketua, adalah menjadi penghubung antara MPRS dan pihak kesatuan-kesatuan aksi, karena kedekatannya dengan kelompok-kelompok massa.

Pada bulan Maret 1967 berlangsung Sidang Istimewa MPRS dengan agenda paling penting, yaitu

memberhentikan Soekarno sebagai Presiden/Mandataris MPRS. Sedangkan puncak acara sidang tersebut adalah pelantikan Pj. Presiden. Ini merupakan salah satu peristiwa penting sepanjang sejarah Indonesia modern, karena setelah 21 tahun berkuasa, jabatan Presiden Soekarno dipersoalkan sekaligus diganti. Sidang Istimewa ini memang memenuhi tuntutan rakyat yang sudah tidak percaya lagi kepada kepemimpinan Soekarno menyusul terjadinya G30S PKI, dan meminta agar Soeharto diangkat menjadi Pj. Presiden.²⁰

Meskipun soal pergantian presiden ini muncul persoalan bagaimana mengatur konstitusinya, bagi pimpinan MPRS masalah pergantian presiden yang berhalangan bukanlah merupakan sesuatu yang sulit, sebab TAP MPRS No. XV tahun 1966 bisa diartikan 'jika presiden berhalangan melakukan tugas, tugas tersebut dilakukan oleh caretaker.' Ini sejalan dengan resolusi DPR saat itu dengan menggunakan TAP tersebut meminta agar presiden berhenti, diganti dengan Pj. Presiden sampai pemilu terlaksana. Sidang Istimewa akhirnya usai dengan pelantikan Soeharto sebagai Pj. Presiden berdasarkan TAP No. XXXIII/MPRS/1967, suatu ketetapan paling bersejarah tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno.²¹

Suara kritis Subchan

Dalam masa sidang MPRS bulan Juni-Juli 1966, Subchan ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPRS



Subchan ZE

sampai pelantikan MPR hasil pemilu tahun 1971. Di arena MPRS sebagai gelanggang politiknya, peranan Subchan yang paling utama, di samping menjadi penghubung antar kesatuan aksi dan MPRS (karena kedekatannya dengan kelompok-kelompok massa) adalah memantau perkembangan pembangunan ekonomi dan demokrasi yang dilaksanakan pemerintah. Tugas ini dibebankan kepada dirinya karena kedalaman pengetahuannya di bidang ekonomi dan perdagangan.

Menjelang diselenggarakannya Sidang Umum MPRS V tahun 1968, Pj. Presiden didampingi para pembantunya yang umumnya ahli di bidang ekonomi membaca pidato yang amat

penting pada Sidang Badan Pekerja yang kelak isi pidato tersebut menjadi dasar dari Pola Dasar Pembangunan Nasional Lima Tahunan (Pelita), yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada penanaman modal asing. Isi pidato tersebut di antaranya menekankan pentingnya bantuan (hutang) luar negeri.

Menanggapi pola dasar pembangunan yang baru ditetapkan ini, Subchan banyak melontarkan kritik. Menurut Subchan, pembangunan ekonomi harus mengarah pada ditegakkannya tata kehidupan demokrasi dan pelaksanaannya harus ada keterkaitan yang erat antara kebijaksanaan ekonomi dengan politik, sebagai mekanisme kontrol. Karena sumber pembiayaan pembangunan berasal dari utang luar negeri.²² Subchan juga mengkritik adanya kontradiksi dalam pembangunan ekonomi: di satu pihak belum

Sumber: Dok. Lapresdam

bisa melepaskan diri dari etatisme; bahkan di beberapa sektor diperkuat pemusatan kekuasaan yang dibebaskan dari mekanisme kontrol aparat yang berwenang dan dibentuk lembaga-lembaga yang langsung bertanggung jawab pada presiden. Namun di pihak lain, dilakukan suatu liberalisme kebijaksanaan perekonomian secara penuh, sehingga liberalisasi ini bisa mendorong Indonesia pada ketergantungan yang besar (*complete economical dependency*) terhadap negara-negara penanam modal.

Perihal perkembangan demokrasi Orde Baru saat itu, dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua MPRS ini, Subchan tidak segan-segan mengkritik aparat pemerintah dan kekuatan sopol yang dianggapnya menyimpang dari garis Orde Baru. Kritik-kritik yang dilontarkan Subchan merupakan respon balik dari perkembangan politik Orde Baru yang terpusat kepada eksekutif, khususnya kepada presiden. Keresahan Subchan dipicu oleh sebuah perkembangan politik di mana (sebagaimana kesaksian Nasution) beralihnya pengambilan keputusan dari lembaga-lembaga konstitusional semakin nyata. Sehingga posisi dan kewibawaan Staf Pribadi Pejabat Presiden makin menonjol. Khususnya bidang politik yang dijabat oleh Kolonel Ali Murtopo dan bidang ekonomi keuangan oleh Kolonel Sudjono Humardani, beserta aparat intel yang waktu itu disebut "operasi-operasi khusus". Dalam konteks demikian, partai-partai politik dan ormas atau lembaga-lembaga konstitusi seperti DPR, MPR, Kabinet, khususnya menteri-menteri semakin berada dalam posisi yang "ditukangi" dan "dimobilisasi" guna mengamankan politik pemerintah serta melegitimasiannya.²³

Dalam menjalankan tugas keparlemenan, Subchan betul-betul merasakan manuver-manuver pemerintah yang semakin melemahkan fungsi-fungsi parlemen dan melecehkan keberadaannya. Sebagai misal, Sidang Umum MPRS V Maret 1968, di mana telah terjadi pertentangan di kalangan elit politik, terutama antara kubu eksekutif dan legislatif. Perbedaan itu di antaranya menyangkut hal-hal sbb: 1. Bagaimana proses pengangkatan presiden dan

wakil presiden²⁴ 2. Soal pelaksanaan pemilihan umum²⁵ dan sistem kepartaian yang berorientasi pada program kesejahteraan rakyat,²⁶ dan 4. Pola kebijaksanaan pembangunan Indonesia di masa datang. Dalam menyelesaikan perbedaan pendapat ini, pimpinan MPRS mempersoalkan cara-cara represif yang dipakai oleh pihak eksekutif dalam menggolkan konsep-konsepnya.²⁷

Dengan berbagai penekanan inilah, akhirnya konsep-konsep pembangunan yang datang dari eksekutif yang didukung oleh ABRI dan teknokrat berhasil disepakati oleh semua fraksi dan diputuskan MPRS. Dalam keputusan yang digodok di komisi I bidang politik itu yang terpenting adalah menunda pemilu sampai 5 tahun untuk memberikan kesempatan pada Soeharto merampungkan Repelita I.

Sedangkan komisi II dan III tidak berhasil, karena fraksi pendukung pemerintah, Golkar, tidak bersedia lagi membicarakan naskah-naskah di luar yang diperlukan Presiden. Adapun hasil-hasil komisi I yang disahkan oleh sidang meliputi: TAP No. XLI/MPRS/1968 berisi tugas Kabinet Pembangunan;²⁸ TAP No. XLII/MPRS/1968 berisi pemilu;²⁹ TAP No. XLIII/MPRS/1968 tentang penjelasan TAP No. IX/MPRS/1968³⁰ dan TAP No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban TAP No. IX/MPRS/1968 menjadi Presiden untuk 5 tahun mendatang. Demikianlah menjelang penutupan sidang, Ketua MPRS melantik Jenderal Soeharto menjadi presiden RI yang kedua. Fenomena politik ini semakin meneguhkan kubu Presiden Soeharto untuk tidak mampu dibendung oleh kekuatan lainnya.

Dalam sebuah pidato radio tahun 1968, Subchan melontarkan kritik terhadap pemerintah dan menganggap bahwa kaidah-kaidah Orde Baru sudah mulai kabur dan tidak lagi menjadi landasan perjuangan seluruh komponennya. Subchan mengingatkan kembali bahwa dasar perjuangan Orde Baru itu mengandung; 1. Pengakuan tata kehidupan demokrasi; 2. Penegakan tata kehidupan hukum dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari; 3. Mengusahakan adanya pendemokrasian di dalam pelaksanaan

ekonomi; 4. Penegakan hak-hak asasi manusia.³¹

Subchan menyatakan bahwa yang menjadi esensi demokrasi yang hendak dikembangkan di Indonesia haruslah mengacu pada konsep-konsep berikut: 1. Suatu doktrin pemerintah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, penghindaran adanya penindasan, dan penghindaran dari peniadaan hak-hak asasi manusia; 2. Suatu prosedur musyawarah untuk mendapatkan suatu pendapat yang mengkristal dari suatu masyarakat, dengan *process of decision making*; 3. Menciptakan pemerintahan yang sistemnya tidak memungkinkan terjadinya suatu pengendapan kekuasaan pada jenjang tertentu atau eselon tertentu sehingga terdapat suatu mekanisme kontrol yang kon-tinyu (*continous chain of control*).

Sementara itu dalam pidato radio menyambut Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 1968, sebagai Wakil Ketua MPRS, Subchan antara lain menekankan perlunya suatu perubahan struktur kekuatan politik yang sehat dan demokratis; perlunya ditegakkan tata kehidupan demokrasi secara konsekuen, dan perlunya ditingkatkan tindakan pemberantasan korupsi. Seruan itu merupakan refleksi Subchan atas kondisi sosial yang dinilainya cenderung mengaburkan nilai-nilai perjuangan Orde Baru, dengan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang sudah merajalela di banyak tingkatan kekuasaan. Pengamatan Subchan menyimpulkan bahwa cara-cara berjuang Orde Lama yang tidak jujur dan tidak bersifat terbuka seperti jalan intrik dan konspirasi-konspirasi mulai muncul ke permukaan.

Pada periode selanjutnya, sikap kritis Subchan berkembang menjadi kecenderungan yang oposisional terhadap dominasi eksekutif di bawah Soeharto. Hal ini bisa dilihat misalnya dari perlawanan Subchan sebagai representasi MPRS terhadap upaya pemerintah untuk merombak anggota DPRGR dan MPRS. Ia melihat bahwa dalam jangka panjang, hal ini akan merugikan eksistensi partai politik. Contoh lain yang bisa dikemukakan di sini adalah penolakan Subchan terhadap Permen 12/1969 yang dikeluarkan Mendagri Amir Mahmud yang mengatur pemurnian anggota Parlemen yang lebih menguntungkan Gol-

kar. Dalam menghadapi Permen ini, Subchan bersama tokoh kritis lainnya, termasuk orang-orang NU yang sepaham dengannya, menentangnya tidak saja melalui perdebatan konseptual dan argumentasi rasional, juga menggunakan ancaman *walk out* dari parlemen dan bahkan protes keras dengan cara "tirakat bisu" dan puasa (mogok makan), serta usaha ritual keagamaan seperti solat hajat dan doa istighatsah.

Masalah ini berkembang menjadi polemik berkepanjangan antara kubu Subchan dan kubu Amir Mahmud dalam kurun awal tahun 70-an. Polemik ini bermula dari surat yang dikirim Subchan di atas kertas berkop pimpinan MPRS yang ditujukan kepada Amir Mahmud yang berisi penolakan atas Permen tersebut. Polemik mereka berdua sesungguhnya merupakan pertentangan antara Partai Politik dengan pemerintah.

Menyuarakan perubahan di NU

Subchan ZE memulai karir di NU pada tahun 1953, ketika duduk sebagai pengurus Ma'arif NU di Semarang Jawa Tengah. Tiga tahun kemudian dalam Kongres NU Medan, di mana Idham Kholid terpilih sebagai ketua umum Partai NU, Subchan muncul di arena kongres sebagai anak muda NU yang dipandang amat potensial, sehingga dalam kepengurusan NU, Subchan duduk sebagai ketua departemen ekonomi. Dalam kongres berikutnya di Solo 1962 Subchan terpilih sebagai ketua IV PBNU. Dalam muktamar NU di Bandung, Subchan terpilih menjadi ketua I PBNU, jabatan kedua setelah Idham Chalid. Sedangkan pada Muktamar NU Surabaya tahun 1971 jabatan yang sama diserahkan Subchan kembali.

Kiprah Subchan di NU, menurut Umar Basalim yang pernah menjadi sekretaris pribadinya, terutama didasari oleh keinginan Subchan untuk mengeluarkan NU dari sikap "eksklusifisme". Karena itu tak mengherankan jika Subchan diterima di kalangan yang luas, meski pihak *establishment* NU memandang dengan sebelah mata. Untuk itu Subchan menyiapkan suatu konsep NU di masa datang. Yakni, melalui tema-tema demokrasi dan kepemimpinan kolektif di tubuh NU. Juga dengan cara melepaskan NU dari tradisi keke-

luargaan sehingga menjadi organisasi modern. Pada forum-forum terbuka Subchan senantiasa melansir obsesinya mengenai sistem kepemimpinan yang tidak eksklusif, yang bisa mempercepat masyarakat keluar dari tradisionalisme. Ide-idenya mengenai kepemimpinan modern ini, juga sekaligus merupakan kritik terhadap pola kepemimpinan Orde Baru yang makin mengarah kepada pemusatan kekuasaan dan “golonanisme”. Subchan berpendapat, jika sebuah organisasi atau pemerintahan memilih seorang pemimpin karena semata pertimbangan tingkatan moralnya, ini merupakan langkah mundur ke Abad Pertengahan. Pada Abad Pertengahan, demikian Subchan, sukses tidaknya suatu pemerintahan tergantung pada tinggi-rendahnya moralitas seorang raja, atau khalifah atau sultan. Menurut dia, pada abad modern ini suatu pemerintahan harus diperintah oleh satu sistem; *ruled by system, not by man*.³² Menurut konsep ini seorang top figur dalam satu organisasi hanya seorang *regulating officer*, dan dia memerintah atas dasar sistem yang disepakati. Syaratnya, menurut Subchan, harus efisien, relatif jujur, dan punya keberanian. Pemikiran tersebut memang merupakan kelanjutan dari prinsip-prinsip demokrasi yang diyakini Subchan, yang salah satunya adalah menghindarkan penumpukan kekuasaan pada satu jenjang tertentu. Singkatnya, kekuasaan harus dibagi.

Tetapi ide-ide semacam itu merupakan barang aneh pada saat mana sistem kepartaian masih bertumpu pada ideologi dan di mana masyarakat saat itu masih kuat bertumpu pada norma-norma feodalisme. Dan ide-ide seperti itulah yang hendak diterangkan Subchan dalam tubuh NU. Mahbub Djunaedi, yang ditemui penulis di Bandung tahun 1983, melukiskan Subchan sebagai tokoh muda yang sering bertukar dengan tokoh tua yang menghendaki *establishment* terutama para kyai sepuh garis pendiri NU Jombang. Pikiran Subchan sering terasa aneh bahkan sama sekali asing di telinga para kyai. Karena itu Subchan sangat menghendaki adanya perombakan personalia dalam struktur NU, dengan memperbanyak unsur generasi mudanya. Hal ini dianggap Subchan cukup strategis untuk mengubah kultur NU yang

sangat tergantung sepenuhnya dari pihak Syuriah yang diduduki kiai, menjadi NU yang dinamis, terbuka dan tidak eksklusif. Ide Subchan ini ternyata oleh kaum tua NU dilihat sebagai ancaman.

Gerakan demokratisasi Subchan di NU tidaklah semata-mata berkutat pada wilayah ide dan gagasan. Di sini ia terlibat langsung dalam pergulatan politik berhadapan dengan kelompok *establishment* NU, baik di arena NU maupun dalam kancah parlemen. Dalam kasus Permen 12 di atas, ia berada dalam kubu yang berseberangan dengan Idham Chalid, KH. Syaichu dan Nuddin Lubis yang sangat dekat dengan pemerintah dan lebih memihak dan memberikan legitimasi kepada pemerintah. Hal terakhir inilah yang sesungguhnya menjadi alasan mengapa banyak usaha-usaha telah dilakukan oleh orang NU sendiri maupun dengan bantuan orang di luar NU untuk menyingkirkan Subchan dari kepengurusan PBNU. Maka kurang tepat jika dikatakan alasan penyingkiran Subchan adalah karena soal-soal moral seperti “play boy”, “pemimpin NU yang tak NU” atau “santri sekuler”.

Dalam diri Subchan ZE, kita temukan sosok politikus *cum* intelektual yang sangat berpengaruh yang berjuang mewujudkan obsesinya tentang sebuah masyarakat yang ideal. Sebuah negara yang demokratis. Namun ia kurang beruntung karena harus berhadapan dengan tembok *establishment* di lingkungannya sendiri, NU maupun pada wilayah politik negara. Perjalanan Subchan bagaikan suara-suara tentang demokrasi dari tenggorokan yang tercekik. Lirih.

Catatan:

¹ Mengenai lahirnya, ada yang menyatakan tanggal 1 Januari 1930. Ny. Maesaroh, ibu angkatnya yang pernah ditemui penulis di Kudus Jawa Tengah, mengatakan tidak ingat tanggalnya. Tetapi Solichin Salam dalam tulisannya, “HM. Subchan ZE. Seorang Politikus yang Berwatak” dalam *Berita Buana*, 25 Januari 1973, menyangsikan tahun-tahun tersebut. Solichin menduga Subchan setidaknya dilahirkan pada tahun 1928.

² Citra diri seperti itu disimpulkan penulis setelah wawancara dengan beberapa tokoh yang dekat dengan Subchan. Mungkin kurang tepat, namun untuk lebih mendekatkan identifikasi diri, gambaran awal ini untuk sementara dipakai. Harry Tjan Silalahi,

seorang kawan dekatnya dalam KAP Gestapu, menggambarkan rekannya ini sebagai seorang "free willer" yang mempunyai pikiran jauh ke depan, cenderung tak mau diikat oleh aturan organisasi, dan berani mengambil resiko yang paling buruk sekalipun, untuk mempertahankan pendapatnya. Subchan merupakan tokoh muda paling populer di kalangan kesatuan aksi dan parpol. Saking populernya, seorang tokoh muda, Eky Syachruddin, entah bergurau atau tidak, menyatakan bahwa "Salahnya saja banyak yang mengikuti, apalagi benarnya".

³ Wawancara penulis dengan Harry Tjan Silalahi.

⁴ Kepergian Subchan ZE sangat mengagetkan. Banyak orang merasa kehilangan termasuk di antaranya Ali Murtopo yang menganggapnya sebagai guru dalam beberapa hal, terutama dalam keberaniannya menyatakan dan mempertahankan pendapat. "Dia adalah teman dialog dalam hal apapun," kata Murtopo. Sedangkan Moch. Roem mengatakan tentang kematiannya, "Itulah cara orang besar meninggal dunia" (*Harian Kami*, Rabu 31 Januari 1973). Penuturan H. Faesal Rachlan (adik kandungannya), seperti diberitakan *Harian Kompas* 1 Februari 1973, menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu siang tanggal 21 Januari 1973 jam 14.00 waktu setempat dan satu jam kemudian Subchan meninggal. Jenazahnya dikebumikan di Tanah Suci Mekah.

⁵ Dalam kesaksian yang serupa, A.H. Nasution dalam bukunya, *Memenuhi Panggilan Tugas*, jilid 6, halaman 273 menulis sebagai berikut: "Pada tanggal 1 Oktober diadakan pertemuan oleh Subchan dari PBNU dengan tokoh-tokoh alumni HMI dan Masyumi dan mereka berturut-turut menghubungi Panglima Umar serta Jenderal Sucipto (KOTI) dan dari sini terutama mulailah proses persatuan partai-partai yang anti komunis, yang tegas-tegas menuntut tindakan-tindakan terhadap PKI. Berangsur-angsur dari sini lahir Kesatuan Aksi yang belakangan menjadi Front Pancasila". Sesudah pertemuan tersebut mulai muncul berbagai pernyataan protes ormas dan parpol terhadap tindakan PKI.

⁶ Isi pernyataan selengkapnya terdiri dari 11 nomor Lihat A.H.Nasution dalam, *op. cit.*, hal. 274-275, diantaranya: 1. Mengutuk perbuatan kontra revolusi dari apa yang menamakan dirinya G30S dengan apa yang mereka namakan Dewan Revolusinya; 2. Hanya mengakui Bung Karno sebagai PBR/Presiden RI seumur hidup/Pangti ABRI; 3. Mendesak pemerintah supaya segera mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang atau golongan atau organisasi yang ikut mendalangi atau mendukung gerakan kontra revolusi tersebut, dengan jalan membubarkan organisasi-organisasi yang bersangkutan; 10. Berseru kepada rakyat umumnya dan parpol aktif membantu pihak keamanan memulihkan kembali seperti sediakala; dan 11. Kepada organisasi yang tidak ikut dalam pertemuan diharapkan memberikan dukungan kesetiaan.

⁷ Pernyataan tersebut selengkapnya ditandatangani HM.

Subchan ZE (NU), H. Anwar Cokroaminoto (PSII), RG. Duriat (Partai Katolik), R. Rasyid HL (IPKI), Moh. Mawardi (Muhamadiyah), Kamil Prawiasoma (Sekber Golkar anggota Front Nasional), Agus Sudono (Gasbiindo), Lukman Harun (Generasi Muda Islam), A. Sumadi (KBKI). Pada tanggal 4 Oktober itu juga diadakan rapat akbar terhadap aksi PKI. Para pembicara antara lain Subchan ZE (NU), Projokusumo (Muhamadiyah), Yahya Ubaid (NU), Tejomulyo (Katolik), Syeh Marhaban (PSII) dan lain-lain. Terhadap aksi G30S PKI, Jenderal Sughandi mempopulerkan istilah Gestapu, yang mengingatkan orang pada Gestapo Hitler di Jerman.

⁸ KAP Gestapu berintikan para pemuda dari berbagai unsur golongan, parpol, ormas, organisasi pemuda dan mahasiswa dengan kepengurusan sbb: Ketua: HM. Subchan ZE (NU), Sekjen: Harry Tjan Silalahi (Katolik), Sekretaris/Ketua Pengerahan Massa: Lukman Harun (Muhamadiyah), Keamanan: Erwin Baharuddin (IPKI), Keuangan: Syarifuddin Harahap (HMI), Anggota: Agus Sudono, Ismail Hasan SH, Yahya Ubaid, Liem Bian Kie, Mar'ie Muhammad, Syarifudin Siregar Pahu, Ramli Harahap, Husain Umar, dan lain-lain dengan rumah Subchan ZE, Jalan Banyumas 4 Menteng sebagai Markas Besar dan kantor PMKRI Jalan Sam Ratulangi 1 Jakarta sebagai sekretariat. Dalam perjalanan berikutnya KAP juga membentuk semacam presidium yang terdiri dari unsur-unsur NU (KH. Dahlan, Subchan ZE dan Yusuf Hasyim), Partai Katolik (IJ. Kasimo, Duriat, Harry Tjan), Parkindo (AM. Tambunan, Passila), IPKI (Ratu Aminah Hidayat, Sukindro), Perti (Sidi Marjohan, Rusdi Halil), Muhammadiyah (H. Marzuki Yatim, Ir. HM. Sanusi, Lukman Harun), Gasbiindo (Agus Sudono), Soksi (Suhardiman dan Mujono SH).

⁹ Berdirinya KAMI direstui oleh Menteri PTIP Syarif Thayeb, dengan ketua presidium yang pertama Zamroni dari PMII (Mahasiswa NU). Terbentuknya KAMI, disusul oleh terbentuknya kesatuan-kesatuan aksi lainnya yang semuanya itu berdiri di belakang Front Pancasila yang menggerakkan kekuatan massa melawan PKI. Jakarta dan kota-kota besar lainnya selalu marak dengan demonstrasi. Demonstrasi yang berlangsung sejak Oktober 1965 sampai dengan Maret 1966 ini menuntut pembubaran PKI, pembubaran kabinet dwikora dan penurunan harga yang dikenal sebagai Tritura (tiga tuntutan rakyat). Tuntutan itu akhirnya berhasil, karena pada 12 Maret 1966, sehari setelah Supersemar ditangan Soeharto, diumumkan pembubarab PKI dan ormasnya, sejak pertama kali, tanggal 5 Oktober 1965, terdengar tuntutan pembubaran PKI oleh Patai NU. Dengan demikian kemenangan berada di pihak rakyat dan Orde Baru telah lahir.

¹⁰ DN. Aidit semula dikenal sebagai pelarian pemberontakan Madiun yang kemudian melakukan pengembaraan ke Vietnam dan RRC. Pada bulan Juli 1950 dia berhasil kembali ke tanah air. Berkat pengalamannya bersama kaum komunis Vietnam,

dan kesaksiannya terhadap kridanya Tentara Merah Cina menggulung kaum Kuomintang pimpinan Chiang Kai Shek kelak akan menjadi teladan utama dalam memimpin PKI mencapai kejayaannya. Pada tanggal 7 Januari 1951 ketika CCPKI memilih polit-biro, Aidit berhasil memegang tampuk pimpinan. Empat orang lainnya adalah Lukman, Nyoto, Sudisman dan Alimin.

¹¹ Lihat buku, *Kesaksian Pancasila di Bumi Pertiwi*, diusahakan oleh Badan Penyelenggara Penerbitan Kesaktian Pancasila, Penyusun Radik Utoyo Sudirjo, hal. 58 dan seterusnya.

¹² Sehubungan Penpres No. 7 ini Partai Masyumi dan PSI terkena dan kemudian dibubarkan. Dengan Dekrit itu pula dibentuklah kabinet Kerja dengan program kerja: sandang pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat.

¹³ Dalam hal ini Partai NU dengan tegas mengatakan bahwa persoalan HMI adalah persoalan umat Islam, untuk itu NU menyatakan diri siap mengorbankan jiwa dan raga demi kelangsungan hidup HMI. Untuk ide ini, Subchanlah yang menjadi pelopornya. Untuk pembelaannya ini, sampai akhir hayatnya, Subchan dikenal sebagai orang yang sangat dekat HMI. Dia begitu berpengaruh di kalangan anak-anak HMI. Rumahnya di Jalan Wahid Hasyim, pernah dijadikan "markas" anak-anak HMI.

¹⁴ Perkenalan Subchan dengan Harry Tjan, secara pribadi dipertemukan oleh Nono Anwar Makarim. Perkenalan ini kemudian dilanjutkan dengan saling kontak. Ketika situasi nasional makin panas, kontak kedua pemuda ini makin intensif dan berubah menjadi diskusi-diskusi untuk mengatur strategi perlawanan dan sedikit banyak melibatkan dua unsur partai (NU dan Partai Katolik): Subchan waktu itu sebagai ketua IV Partai NU, sedangkan Harry sebagai Sekjen Partai Katolik. Bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terhadap komunis ini kelak menjadi sangat efektif karena di satu pihak Subchan mendapat dukungan dari kalangan Islam, dan di pihak Harry mendapat dukungan dari kalangan Katolik dan Kristen.

¹⁵ Dari sini Subchan sudah mulai merintis pembentukan KAP Gestapu yang beranggotakan partai politik, ormas dan kekuatan sosial politik lainnya yang merupakan kekuatan untuk melawan gerakan komunis, di mana sebagai ujung tombak dari aksi nantinya antara lain KAMI, KAPPI, Lasykar Ampera dan sebagainya.

¹⁶ Sebelum subuh tanggal 1 Oktober 1965, Gerakan Komunis beraksi, menembak mati Letjen Ahmad Yani, Menteri/Panglima TNI AD, dirumahnya, dan berturut-turut lainnya Mayjen Haryono, Deputy Khusus, Mayjen Suprpto, Deputy Pembina, Mayjen S. Parman, Asisten I, Brigjen DI. Panjaitan, Asisten IV, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, Oditur Jend.; mereka diculik dan dibawa ke Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Nasution dapat meloloskan diri, namun Ade Irma Suryani, 5, anaknya mati terbunuh. Sedangkan Lettu Pierre Tendean diculik

dan dibawa ke Lubang Buaya, lalu dibunuh (Sartono Kartodirdjo et al., op cit, hal. 122).

¹⁷ Lihat, Radik Utoyo Sudirjo. et al. (penyusun), op cit, hal 77.

¹⁸ Tersusunnya Kabinet Ampera ternyata mengundang ketidakpuasan di kalangan pimpinan MPRS, seperti dinyatakan oleh Nasution. Sebabnya menurut Nasution, Jenderal Soeharto hanya sekali saja berkonsultasi dengan pimpinan MPRS dan terhadap pimpinan parpol malah hanya diminta usul-usul dan pertimbangan saja. Nasution menganggap pembentukan kabinet tidak sepenuhnya melibatkan aspirasi kalangan partai (Lihat AH. Nasution, op. cit., jilid 7, [Jakarta: CV Mas Agung, 1989, hal. 59-61). Dari peristiwa itu mulailah muncul benih-benih perbedaan yang dikemudian hari menjadi pertentangan yang tajam antara pimpinan MPRS dan kalangan eksekutif.

¹⁹ Di Seskoad, Jend. Suwanto diserahi tugas menggodok konsep strategi pemikiran pembangunan jangka pendek. Pada bidang ekonomi ditunjuk Prof. Widjojo Nitisastro dan kawan-kawannya dari Universitas Indonesia di antaranya Emil Salim, M. Sadli, Radius Prawiro yang semuanya telah mendapatkan gelar kesarjana dari Amerika Serikat. Juga direkrut Prof. Sarbini Sumawinata untuk membantu menyusun konsep sosial politik. Dan yang kelak mempunyai pengaruh yang amat besar dalam proses pembangunan Orde Baru adalah dibentuknya SPRI (Staf Pribadi) Jend. Soeharto di antaranya Mayor Jend. Alamsyah Ratuprwiranegara, Kolonel Suryo, Kolonel Sudjono Humardani, dan Kolonel Ali Murtopo. Di jajaran ABRI juga dilakukan mutasi panglima dan pergantian posisi-posisi strategis.

²⁰ Pernyataan tersebut di antaranya datang dari Pimpinan ABRI tertanggal 24 Pebruari 1967 yang isinya, "Dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan yang merupakan penyerahan keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pengemban TAP No. IX/MPRS/1966, maka: 1. Penyelesaian konflik, politik, telah sampai pada upaya rintisan, untuk tetap menuju kepada kemurnian pelaksanaan UUD 45; 2. ABRI, demi kepentingan kehidupan demokrasi dan konstitusi, tetap akan mengamankan terselenggaranya Sidang Istimewa MPRS; 3. Kepada rakyat Indonesia seluruhnya diminta agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan bagi stabilitas nasional, demi keselamatan rakyat, bangsa, negara dan revolusi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." Sehari sebelumnya, tanggal 23, DPR menerima Resolusi Jamaludin Malik dan kawan-kawan dari NU, yang mengusulkan kepada MPRS agar Presiden Soekarno diberhentikan dan agar Jend. Soeharto diangkat menjadi Pj. Presiden.

²¹ TAP No. XXXIII antara lain berbunyi: Pasal 1. Menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggung jawaban konstitusioanal, sebagaimana layaknya kewajiban seorang mandataris terhadap MPR(S), sebagai yang memberi mandat, yang diatur dalam UUD 1945; Pasal 2.

Menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap MPRS sebagai yang memberi mandat, yang diatur dalam UUD 1945; Pasal 3. Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilu dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik mandat MPR (S) dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 4. Menetapkan berlakunya TAP No. IX/MPRS/1966, dan mengangkat Jend. Soeharto, Pengemban TAP No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan pasal 3 UUD 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu; Pasal 5. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR (S).

²² Subchan ZE, "Politik sebagai Sarana dalam Pembangunan Ekonomi", makalah disampaikan pada diskusi ekonomi Universitas Indonesia, tahun 1968.

²³ Lihat Dr. A.H. Nasution, *op. cit.*, jilid 8, hal. 1.

²⁴ Dalam hal ini, sudah sejak semula hampir-hampir tidak ada persoalan mengenai siapa yang bakal jadi Pj. Presiden dan Presiden sebab semua kekuatan masyarakat, ABRI maupun kalangan legislatif sendiri mendukung Jend. Soeharto. Yang dipersoalkan adalah bagaimana bentuk pertanggung jawabannya terhadap mandat yang diemban di hadapan MPRS.

²⁵ Konsensus pertama soal pemilu diformulasikan pada Juli 1967 antara pemerintah dan panitia khusus DPR: 1. Residence requirements untuk calon dilepas; 2. Tiap kabupaten dapat minimal 1 anggota DPR; 3. Anggota DPR berjumlah 460 orang dan diangkat 100 orang; 4. Sepertiga anggota MPR diangkat oleh Presiden; 5. Sistem proporsional dengan daftar calon. Inilah bentuk kompromi antara pemerintah, AD dan partai politik. Sesungguhnya Seminar AD menginginkan agar pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik tetapi partai politik waktu itu belum siap, sedangkan di pihak lain presiden ingin mendapatkan hak mengangkat sepertiga dari anggota MPR.

²⁶ Soal kepartaian ini sering didesas desuskan bahwa pengalaman G30S terjadi karena terlalu banyak partai yang berorientasi pada ideologi. Untuk itu perlu adanya penyederhanaan partai yang berorientasi pada pembangunan. Sejak saat itu diadakan konsolidasi ke arah penyatuan partai.

²⁷ Dalam pertentangan itu, Nasution sebagai Ketua MPRS menyatakan sbb: "Pada pokoknya saya menyetujui pokok-pokok yang dikedepankan oleh Pj. Presiden. Namun yang menjadi soal ialah cara pendekatan politik. Para wakil ketua saya, yang adalah ketua-ketua partai menyatakan rasa ditekankan dan 'digarap'. Sementara itu terjadi brifing-brifing di berbagai lingkungan dan instansi. Beberapa bekas anak buah saya ikut dalam brifing tentang golongan Islam yang mau mengamandir Pancasila dan Piagam Jakarta. Begitu pula ada brifing yang menfitnah saya ingin jadi calon presiden." (Lihat Dr. A.H. Nasution, *op. cit.*, Jilid 8, hal. 35). "Di masa itu Wakil Ketua

Subchan ZE yang paling gigih membela integritas "kedaulatan" MPRS meminta izin pada saya dengan menyatakan, 'Kalau keadaan berbahaya bagi saya pribadi, apakah saya boleh mencari perlindungan di kompleks rumah Pak Nas.' Ya, tentulah saya iyaikan. Ketika itu saya punya pengawal dari Siliwangi dan Korp Marinir." (Nasution, *op. cit.*, h. 47). Pada paragraf berikutnya, Nasution menulis, "Saudara Subchan memperlihatkan kepada saya, setelah sidang berlangsung, suatu surat yang ditulis oleh salah seorang kolonel dari SPRI Pj. Presiden. Isinya menyebutkan 'mengancam tidak akan terjamin keamanan Wakil Ketua MPRS tersebut jika ia tidak mengubah sikapnya'. Saya membacanya dengan pilu hati, saya merasa tetap sebagai TNI, dan dengan itu amat menyesalkan cara itu." (hal. 48).

²⁸ Isinya: 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Repelita dan pemilu; 2. Menyusun dan melaksanakan Repelita; 3. Melaksanakan pemilu sesuai dengan TAP No. XLII/MPRS/1968; 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap perong-rongan, penyelewangan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945; 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

²⁹ Isinya: 1. Pemilu selambat-lambatnya diselenggarakan 5 Juli 1971; 2. MPR hasil pemilu pada bulan Maret 1973 harus sudah bersidang untuk: a. memilih presiden dan wakilnya, b. menetapkan GBHN, c. menerapkan Rancangan Pola Pelita II. Dengan penjelasan bahwa Oktober 1972 (6 bulan sebelum sidang) MPR sudah dilantik dan bersidang mempersiapkan GBHN dan Repelita II.

³⁰ Isinya: 1. Mengambil semua tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah *come back*-nya G30S/PKI; 2. Mengambil tindakan-tindakan untuk membersihkan aparatur negara dari semua bentuk penyelewangan; 3. Memelihara persatuan bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan RI atas landasan Pancasila dan UUD 1945.

³¹ Pernyataan Subchan ini sejalan dengan isi pernyataan sikap Kesatuan Aksi tanggal 4 Maret 1968 dalam rangka menyongsong Sidang Umum MPRS V yang mengkonstatir adanya aspek-aspek dalam kehidupan politik yang tidak lagi menitik beratkan perjuangan untuk kepentingan dan perbaikan hidup rakyat seluruhnya, tetapi telah nyata-nyata menjurus pada perjuangan untuk kepentingan golongan atau groupnya sendiri dengan mengenyampingkan norma-norma asas demokrasi dan norma-norma politik konstitusional.

³² H.M. Subchan ZE, "Partai Politik dan Demokrasi", parasaran disampaikan pada Pekan Demokrasi I Studi Ilmu Kemasyarakatan ITB, Bandung 24 September 1970.